Daftar Pustaka

Arifin, Zainal dan Tasai. 2008. Cermat Berbahasa Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.

Febriantika, Reza. 2016. *Keefektifan Kalimat Pada Tajuk Rencana Surat Kabar Harian Lampung Post Edisi Maret 2015 Dan Implikasinya Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMK*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. http://digilib.unila.ac.id/22930/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, diunduh 25 Agustus 2018 pukul 21.32.

Kridalaksana, Harimurti. 2008. Kamus Linguistik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Milandari, Baiq Desi. 2017. *Penggunaan Gaya Bahasa Dalam Debat Clon Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022*. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram.https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9BRip3-Cel8J:https://jurnal.unej.ac.id/index.php/fkip-epro/article/download/4909/3622/+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id, diunduh 25 Agustus 2018 pukul 21.32.

Moloeng, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Prasetya, Andika. 2017. "*Ini 171 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak Juni 2018".* Detik News. https://news.detik.com/berita/3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018u, diunduh 22 Agustus 2018 pukul 10.32.

Putrayasa, Ida Bagus. 2010. Kalimat Efektif : Diksi, Struktur, dan Logika. Bandung: Rafika Aditama.

Si Manis. 2017. "*Pengertian Debat, Unsur, Tujuan, Ciri, Jenis, Tata Cara, dan Struktur Debt Terlengkap*". http://www.pelajaran.co.id/2017/03/pengertian-debat-unsur-tujuan-ciri-jenis-tata-cara-dan-struktur-debat.html, diunduh 22 Agustus 2018 pukul 13.03.

Sora. 2015. *"Pengertian dialog dan contohnya secara jelas"*. http://www.pengertianku.net/2015/06/pengertian-dialog-dan-contohnya-secara-jelas.html, diunduh 22 Agustus 2018. 13.48.

Suyamto. 2016. *Ketidakefektifan Kalimat Dalam Jurnal Fluida Volume II No. 2, November Polban 2015*. Bandung : Politeknik Negeri Bandung. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xN7gHVhrak8J:https://jurnal.polban.ac.id/index.php/sigmamu/article/download/830/706+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id, diunduh 25 Agustus 2018 pukul 21.32.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran 1	Format Revisi Skripsi	113
Lampiran 2	Berita Acara Bimbingan Skripsi	114
Lampiran 3	Transkrip Dialog Debat	115

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
Kampus I : Jl. Ngagel Dadi III-B/37 Telp. (031) 5053127, 5041097 Fax. (031) 5662804 Surabaya 60234
Kampus II: Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031) 8281181, 8281182, 8281183 Surabaya 60234
http://fkip.unipasby.ac.id/

FORMAT REVISI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Afifah Eka Sunaryo
NIM : 155200084
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Tanggal Ujian Skripsi : 7 Februari 2019
Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Kalimat Pada Debat Tahap ke-3 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak Tahun 2018

Penguji I : Dr. Rahayu Pujiastuti, M.Pd.
Penguji II : Dr. M. Shoim, M.Pd.

No	Materi Revisi	Penguji I	Penguji II
1	Halaman Judul		
2	Kerapian		
3	Kesalahan pembentukan kata dan kalimat		
4	Kata pengantar dan daftar isi		
5	Definisi istilah		
6	Penutup		

Batas waktu revisi skripsi: 2 (dua) minggu terhitung dari waktu ujian skripsi.

Dosen Penguji I,

Dr. Rahayu Pujiastuti, M.Pd.
NIDN. 0730116602

Dosen Penguji II,

Dr. M. Shoim, M.Pd.
NIDN. 0716056302

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
Kampus I : Jl. Ngagel Dadi III-B/37 Telp. (031) 5053127, 5041097 Fax. (031) 5662804 Surabaya 60234
Kampus II: Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031) 8281181, 8281182, 8281183 Surabaya 60234.
http://fkip.unipasby.ac.id/

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Afifah Eka Sunaryo
NIM : 155200084
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Kalimat Pada Debat Tahap ke-3 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak Tahun 2018

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Pembimbing
1	17 Agustus 2018	Memantapkan judul	
2	23 Agustus 2018	Revisi, diksi, struktur kalimat	
3	28 Agustus 2018	Revisi Data dan sumber data	
4	18 Desember 2018	Revisi bab IV dan V	
5	26 Desember 2018	Revisi bab IV keseluruhan	
6	16 Januari 2019	Revisi V kesimpulan	
7	22 Januari 2019	ACC bab IV dan bab V	
8	24 Januari 2019	ACC sidang Gel 2	
9	29 Januari 2019	Tanda tangan pemberkasan	

Selesai bimbingan skripsi tanggal 28 Januari 2019

Mengetahui
Dekan FKIP,

Dr. Suhari, S.H., M.Si.
NIP. 196801031992031003

Dosen Pembimbing,

Dr. M. Shoim, M.Pd.
NIDN. 0716056302

Debat Pilgub Jatim 3
(Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik)
Khofifah dan Emil
Tanggal 23 Juni 2018
Courtesy TVOne di Youtube

Segmen 1
Penyampaian Visi dan Misi
Khofifah :

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama, bagi seluruh umat Islam yang merayakan Idul Fitri kami ingin menyampaikan minalaidzin walfaidzin mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa dalam nawabakti satya, 9 program yang kita ingin baktikan untuk mewujudkan kemulyaan masyarakat Jawa Timur, maka pada bakti ke-9 adalah Jatim amanah. Dalam Jatim amanah kami berdua Khofifah dan Emil ingin menghadirkan Provinsi Jawat Timur yang efektif untuk mensinerjikan berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat sampai kepada pemerintahan di Desa, pemerintah Kabupaten Kota semua harus berseiring agar terjadi maksimalisasi dan efektifitas seluruh kebijakan dan program baik yang bersifat *top down* maupun *bottom up*.

Berikutnya adalah kami ingin memastikan bahwa, Khofifah dan Emil melalui bakti ke 8 jatim amanah, kita ingin menyampaikan bahwa tidak akan terjadi jual beli jabatan. Maka, proses meritokrasi adalah menjadi bagian penting dan signifikan. Siapapun ASN Jawa Timur yang memiliki kompetensi profesionalitas dan lulus uji kompetensi maka mereka berhak menduduki posisi-posisi strategis pada jabatan-jabatan strategis. Kami juga ingin menyampaikan bahwa dalam jatim amanah kami ingin memastikan bahwa kita bersama-sama akan menyiapkan sistem yang efektif. Bagaiaman kita bersama-sama untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar, langkah-langkah prefentif untuk tidak terjadinya korupsi dalam jajaran pemerintahan

Provinsi Jawa Timur. Kami berharap bahwa layanan publik bisa diakses tanpa diskriminasi.

Segmen 2
Pertanyaan Langsung Dari Panelis
(Tata Kelola Pemerintahan dan Perwujudan Kualitas Pelayanan Public Dalam Industry 4.0)
Khofifah
Tanggapan jawaban dari Gus Ipul Pertanyaan Panelis:

Terima kasih, ada hal strategis yang disampaikan oleh panelis dan saya rasa itu belum terrespon sama sekali dari Gus Ipul. Bahwa kita ini memasuki era industri 4.0, nah industri 4.0 ini meniscahyakan ini yang tadi disampaikan oleh panelis dan belum direspon sama sekali oleh Gus Ipul. Karena ini ada kaitan bagaimana mengintegrasikan dari seluruh sektor-sektor supaya tidak terjadi egosektoral, bagaimana kemudian kita bisa melakukan monitoring realtime kalau industri 4.0 itu bisa berjalan maka sesungguhnya konektifitas diantara seluruh sektor-sektor akan realtime bisa dimonitor oleh siapapun dimanapun. Maka disitulah sebetulnya ada keterbukaan transparansi dan publik polosing itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebetulnya layanan publik juga akan sangat terbantu jika industri 4.0 itu bisa dilakukan oleh ASN Pemprov yang akan datang.

Khofifah
Menjawab pertanyaan dari panelis:

Baik terima kasih, kami ingin menyampaikan bahwa SLRT (sistem layanan rujukan terpadu) inilah yang kami ingin persembahkan kepada masyarakat Jawa Timur jika kami Khofifah dan Emil mendapatkan mandat dan terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Sistem layanan rujukan terpadu bukanlah mimpi, kami kebetulan sudah melakukan pada saat kami dikementrian sosial. Rakyat kecil ingin mendapatkan program PKH karena dia merasa miskin dia tidk tahu mau kemana, rakyat kecil ingin anaknya sekolah ingin dapat kartu Indonesia pintar dia tidak tahu mau kemana, rakyat kecil yang masuk pada usaha mikro usaha kecil ingin

mengurus PRT dia tidak tahu mau kemana, dia mengurus badan POM dia tidak tahu mau kemana.

Sistem layanan rujukan terpadu kami sudah melakukan di 50 Kabupaten Kota saat menjadi mentri sosial. Oleh karena itu, untuk menyiapakan format ini jika kami menjadi Gubernur, sesungguhnya sesuatu yang tinggal kami laukakan, karena format dan bagaimana efektifitas layanan publik bisa diakses oleh masyarakat terkecil dan keterjangkauannya pun insyallah ini menjadi sesuatu yang menjadi niscahya untuk bisa diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Nah, kami berharap bahwa ini akan menjadi bagian dari kelengkapan dari kelengkapan *public surface* kita, karena sesungguhnya untuk memberikan layanan publik masyarakat butuh kepastian, butuh kecepatan dan butuh keterjangkauan.

Emil

Menanggapi jawaban dari Mbak Puti Pertanyaan Panelis:

Penekananya tadi kepada egosektoral dan saya bersyukur bahwa sebaik sebagai professional dibidang infrastruktur maupun sebagai Kepala Daerah saya menyaksikan sendiri bagaimana tantangan itu harus kita hadapi dan bisa kita selesaikan. Memang kata kuncinya adalah komunikasi, kalau lintas tadi dibahas oleh Bu Puti adalah lintas hirarki sebenarnya bagaimana antara Nasional dan Kabupaten nggak sinkron kan Provinsi masuk. Kalau lintas sektor artinya ada infrastruktur PU ada infrastruktur perhubungan, mbangun pelabuhan dimana tapi jalannya dibangun dimana. Nah menyelaraskan ini kata kuncinya adalah tata ruang yang pertama, tata ruang bisa menyelaraskan pembangunan fisik. Nah yang kedua kita juga perlu melihat tadi disampaikan sinkronisasi RPJM ini lah kata kunci kenapa daerah yang kami pimpin bisa meningkatkan peringkatnya di kemendagri karena kita selaraskan sampai ke indikator kinerja dari pusat sampai ke Kabupaten. Peran Provinsi adalah bisa memfasilitasi itu dan ini yang membedanya kami dengannya.

Emil

Menjawab pertanyaan dari panelis :

Terima kasih, jadi memang betul sekali bahwa, kalau kita ingin bicara meritokrasi ada aturan-aturan yang cukup kaku, yang cukup rinjit yang membatasi ruang gerak seorang kepala daerah, saya merasakan sendiri. Untuk bisa segera memberikan sanksi atau bahkan merubah posisi dari pejabat apabila dia tidak perform. Tapi inilah bedanya kenapa kita sudah merasakan ternyata ada yang namanya sasaran kinerja yang dibuat oleh setiap pejabat. Nah disitu, didalam sasaran kinerja itu isinya ternyata selama ini yang baku dibikin itu ada yang namanya *output* berapa dokumen yang dihasilkan, berapa kegiatan yang dijalankan lalu ada kualitatif.

Nah yang lucu begini, ada pejabatan datang komplain tapi pas ditanya bagaiaman kinerja anak buahmu gak bagus, tapi dikasih nilai dikasih nilai bagus, nah untuk mengatasi itu kita mengembangkan yang disebut sebagai kualitatif deskripsi terhadap indikator kinerja. Jadi kalau dia menyelenggarakan event pariwisata tapi yang dateng cuma 100 orang, sama menyelenggara event pariwisata bisa menarik puluhan ribu orang dan sponsor dari mana-mana. Mosok nilainya sama, nah komitmen ini harus dibuat sebagai lampiran dari sasaran kinerja tadi. Kalau ini bisa dibuat, maka ada ruang bagi Pemerintah bagi pejabat yang menjadi atasan untuk menilai lebih objektif nggak ada ewuh pakewuh, karena nggak gampang menghilangkan ewuh pakewuh dan ini yang coba kita terapkan saat ini, dan alhmdllh bisa membantu lebih objektif dan akurat dalam menilai kinerja para pejabat dan pegawai terima kasih.

Segmen 3

Pertanyaan Acak Dari Panelis (A, B, C, D, E)

Khofifah

Menjawab pertanyaan A dari 6 pertanyaan (A, B, C, D, E) :

Yah terima kasih, sebetulnya semua proses perencanaan ada IKU-nya, bagaiamana masing-masing perencana program dari mulai musrenbang itu mereka sudah mengacu pada IKU musrenbang inikan sebetulnya diasumsikan *buttom up participation* dari mulai

musrenbangdes, musrenbangkel, musrenbang Kabupaten Kota, baru kemudian musrenmbang Provinsi . Nah, kalau *buttom up participation* itu semua diikuti elemen-elemen strategis semua diikutsertakan. Maka ini akan menjadi bagian dari penguatan dimana mulai perencanaan IKU-nya ini sudah menjadi referensi, jikalau kemudian ada kapasitas dari ASN barangkali di Kecamatan, di Kabupaten Kota, yang belum memenuhi kualfikasi untuk bisa memahami IKU supaya SAKIP-nya ini bisa terpenuhi maka perlu ada proses pendampingan. Kamipun dulu dikementrian sosial kami juga melakukan itu, kami tidak boleh segan-segan untuk mengundang narasumber bahwa seluruh perencana kan tidak hanya di biro perencanaan, perencana ini sebetulnya ada di masing-masing direktoratat dan masing-masing direktorat kemudian akan menyatu pada perencanaan program ditingkat kementrian baru kemudian kita melihat bagaimana RPJMN dan tugas dari kepersidenan yang didistribusikan kepada seluruh kementrian. Ya, saya ingin melihat bahwa tanpa harus membuat sratifikasi bahwa ini SAKIP-nya B atau SAKIP-nya C atau BB maka sesungguhnya masing-masing perlu proses pendampingan dari tim independen yang bersangkutan.

Khofifah

Menanggapi tanggapan dari Gus Ipul :

Saya agak kaget kalau memutus partisipasi masyarakat, jadi seyogyanya tidak ada monopoli tafsir siapapun masyarakat punya hak untuk diikutsertakan dan proses membangun partisipasi dari bawah itu menjadi bagian yang sudah tersistematisir. Jadi, ada musrenbangnas dan ada musrenbang Provinsi . Ada musrenbang Provinsi dan ada musrenbang Kabupaten Kota, ada musrenbang Kecamatan, ada musrenbang Desa, dan musrenbang Kelurahan. Jadi kalau itu diputus lalu kemudian hanya ekselon 4, ekselon 3, ekselon 2, saya menjadi bertanya-tanya dimana posisi masyarakat dalam proses membangun dan mengartikulasikan kepentingan ketika mereka punya aspirasi-aspirasi yang akan masuk dimana kalau dalam perencanaan sudah tidak dilibatkan. Nah, kemudian pemerintah dari mulai struktur mulai staff ekselon 4, ekselon 2, ekselon 1, hanya sekda ya kalau tingkat Provinsi itu akan menterjemahkan supaya

ada konsistensi pencapaian RPJMN-nya RPJMD-nya dan ini akan menjadi satu kesatuan.

Khofifah

Menanggapi jawaban Gus Ipul C dari (A, B, C, D):

Ya, ada hal yang mungkin Gus Ipul harus memberikan jawaban bahwa ketika jaringan perempuan dan anak ketemu kepada kami bahwa yang mereka tunggu adalah Pergub, saya rasa beliau kalau menjadi bagian yang ikut mengawal Kota layak anak, Kota layak difabel, Kota layak huni saya rasa Pergub itu harusnya sesuatu yang harus segera diterbitkan. Supaya ada payung hukum bagi siapapun yang ingin memberikan layanan-layanan sosial. Menurut Undang-undang 2003-2014 tentang pemerintahan daerah ini sebenarnya kategori yang wajib bagi Provinsi. Oleh karena itu, perluasan layanan cakupan dan batas layanan bagi saudara-saudara yang kebetulan pada posisi difabel perlindungan anak dan rumah layak huni ini harus menjadi bagian prioritas karena ini sebetulnya untuk difabel dan anak ini kategori wajib. Oleh karena itu prioritas-prioritas bagi anggaran APBD kedepan salah satunya adalah menjawab bagaimana sebetulnya pemerintah bisa melayani lebih komperhensif bagi mereka.

Emil

Menjawab pertanyaan E dari 6 pertanyaan (A, B, C, D, E) :

Dikotomi antara belanja langsung, belanja tidak langsung adalah sesuatu yang selalu menjadi perhatian yang menarik. Jangan salah, kalau kita melakukan belanja tidak langsung nggak selalu itu bukan tidak produktif. Yang bisa kita berikan kepada guru-guru honorer ya, yang bisa kita berikan kepada Desa dalam bentuk bantuan keuangan Desa, klasifikasinya belanja tidak langsung loh itu dan itu bisa menggerakkan gotong royong, jadi mohon maaf pertanyaan ini pun harus sedikit saya kasih pandangan sendiri. Karena sebagai kepala daerah saya merasakan betul manfaat dari belanja tidak langsung, justru kami ingin pemprov Jawa Timur sebagai Provinsi yang penduduknya besar bisa mengadvokasi ke Kementrian Keuangan. Jangan dikotomi belanja tidak langsung belanja langsung seperti itu, karena tidak semua hibah itu jelek. Kita

bisa bantu pondok pesantren dengan bantuan sosial apa yang tidak produktif dari itu. Menurut kami produktif, tapi memang dari belanja pegawai setelah ada pelimpahan kewenangan bertambahlah 19.000 pegawai kurang lebih beberapa ribu itu adalah honorer. Menambah anggaran belanja meningkat 2 kali lipat dari 3 koma menjadi 7 koma sekian triliun. Tetapi harus kita ingat, kita tidak membangun hanya dengan aspal dan beton. Kita membangun anak-anak kita dengan pendidikan. Kita membangun masyarakat kita dengan kesehatan. Seluruh insan itu dibayar dengan belanja tidak langsung tadi. Jadi, justru inilah fungsi Gubernur Jawa Timur bisa berjuang di tingkat nasional untuk meluruskan pandanagn-pandanagn seperti ini terima kasih.

Emil

Menanggapi tanggapak Mbak Puti D dari (A, B, C, D ,E) :

Mungkin Ibu Puti tidak menyadari bahwa, yang disebut program yang membantu ini itu banyak loh yang klasifikasinya belanja tidak langsung. Nah, itu karna kami sudah merasakan menganggarkan sendiri. Jadi ini pembedanya kami sudah ngerasakan dan yang disebut tadi mengefisienkan, kami sudah melakukan 3 hal di tahun 2016 dan 2017. Sebagai contoh belanja perjalanan dinas itu dulu di disentralisasi di setiap kabid, kabid, kabid. Sekarang kita sentralisasi di sekertaris dinas. Nah ini contoh yang real bagaiamana belanja ATK tidak duplikatif, itu juga contoh kita ya. Jadi banyak sekali ruang-ruang efisiensi kalau tadi beliau tadi menyampaikan ada ruang efisiensi saya lebih konkrit lagi saya bisa sampaikan yang sudah kita lakukan untuk mengefisienkan anggraan kita. Namun, demikian yang tadi dikatakan tidak menjawab mungkin karena beliau tidak memahami bahwa belanja tidak langsung itu termasuk yang diprogram-programkan tadi. Jadi mudah-mudahan Pemprov Jawa Timur saya tekan lagi harus bisa bersuara atas nama pemerintahan daerah se-Indonesia, terima kasih.

Emil

Menanggapi jawaban Mbak Puti :

Baik, yang perlu menjadi catatan, kami bersyukur sekali bahwa pemerintah daerah yang kami pimpin bukan termasuk di kategori yang tidak mendapatkan WTP. Kita justru dibawah kepemimpinan kami pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan daerah, kita berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian 2 kali berturut-turut sekarang. Namun, demikian kalo tadi dikatakan perlu komunikasih perlu koordinasi, ijinkan saya menambahkan lagi sebagai seseorang yang sudah pernah bener-bener merasakan berhadapan dengan auditor BPK. Jadi, bener bahwa tidak menjamin 100% tidak ada korupsi WTP. Tetapi laporan keuanagn itu harus jelas, pencatatan aset adalah sebab pertama kenapa banyak enggk mendapatkan WTP. Asetnya tidak diinvertarisir dengan baik. Yang kedua adalah pengelolahan badan layanan umum daerah seperti puskesmas, rumah sakit dan juga pengelolahan dana bos. Nah ini adalah area dimana kami memiliki pengalaman dan siap mendampingi Kabupaten untuk meraih itu.

Segmen 4

Pertanyaan Dari Masyarakat (A, B, C)
E-KTP dan *Citizen Charter*
Emil
Menanggapi jawaban Gus Ipul B dari (A, B, C):

Sebagai seorang Bupati saya melayani masyarakat saya untuk mendapatkan E-KTP tadi. Jadi, kalau disampaikan oleh Bapak Saifulloh Yusuf masalahnya adalah KTP ganda, sebenarnya KTP ganda ini bisa selesai kalau dilakukan perekaman biometrik. Jadi, mungkin sumber masalahnya bukan hanya KTP ganda tadi, lebih tepatnya bagaimana kita bisa memperoleh rekam biometrik. Disinilah sebagai pengelola disdubcapil kita melakukan sistem jemput bola bahkan lansia dulu ada sebutan tarzannya dearah kita karena dia nggak bisa merekam itu kita datangi kerumahnya biometrik, nah hal yang paling penting tadi disampaikan oleh beliau adalah diambil alih saja. Nah, ini pandangan yang tidak akan kami lakukan sebagai seorang Gubernur atau Wakil Gubernur nantinya,

karena kalo merasakan langsung bapak saya ngerasakan ngecek arus map dari reseption sampai disitu.

Kenapa urutannya bisa berubah-ubah. Nah masalahnya bukan dialat rekamnya saja pak, tapi alat cetaknya yang terbatas. Belangko mau dikirim banyak kalo cetaknya kapasitasnya hanya sekian ratus per hari. Itu keluarnya akan mandek. Nah disinlahnya makanya kalau turun langsung ke disdupcapil ngerasakan betul apa yang dihadapi suka duka petugas dupcapil. Jadi solusinya jangan diambil alih oleh kita, solusinya lihat bener masalahnya apa, dan lakukan inovasi, kami akan merasa terbantu kalau hal-hal tadi, printer alat cetaknya memadai, kemudian juga tadi biometrik tadi itu bisa dan lintas daerah surat domisili itu juga bisa dibuat lebih jelas, terima kasih.

Khofifah

Menjawab pertanyaan A dari (A, B, C):

Ya, kami berharap bahwa masyarakat akan mendapatkan layanan makin berkepastian, makin terukur, makin mudah dan makin murah. Sehingga proses-proses perizinan baik itu dari masyarakat dilini yang paling bawah maupun kelas menengah dan kelas atas mereka bisa memastikan bahwa ketika mereka berurusan dengan persoalan-persoalan administrasi. Ketika mereka berurusan soal-soal perizinan, ketika mereka berurusan dengan izin-izin usaha dari usaha mikro usaha kecil usaha menengah dan usaha besar. Ini harus bisa dipastikan bahwa mereka akan mendapatkan layanan dengan indikator-indikator pencapaian yang bisa terukur.

Kalau saya ngurus PRT, saya ngurus harus kemana dan berapa lama saya bisa mendapatkan itu. Kalau saya ngurus izin sekolah saya ngurus kemana dan saya bisa berapa lama mendapatkan izin sekolah. Kalau saya mengurus rumah sakit pratama saya bisa mengurus dimana dan berapa lama saya bisa mendpatkan konfirmasi bahwa rumah sakit pratama atau klinik pratama bisa saya dirikan dengan berbagai kualifikasi dan persyaratan-persyaratan yang semuanya serba bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka. Hari ini kinerja pemerintahan yang sudah terbangun dengan sangat baik pada

periodenya Pakde Karwo, tentu dikonfirmasi kembali kepada seluruh layanan-layanan publik yang bisa makin mudah diakses makin terukur dan makin bisa memberikan kepastian kepada seluruh halayak.

Segmen 5
Masing-Masing Paslon Saling Memberikan Pertanyaan Disclaimer dan Sinkronisasi
Khofifah
Pertanyaan kepada Paslon 2:

Baik terima kasih, rasanya kami yang ada disini berapa kali mendapatkan penjelasan bahwa Paslon 2 begitu mengetahui secara tehnis bagaimana sebetulnya akuntabilitas anggaran yang berbasis rakyat kembalinya mestinya kepada rakyat dan untuk rakyat bagaiaman ketika saudara melihat ada Kabupaten atau Kota di Jawa Timur dan kemudian mengalami *disclimer* bahkan tahun berikutnya juga *disclimer*. Apa yang saudara lakukan ketika pemerintah Provinsi mengetahui bahwa ada daerah yang sudah *disclimer* kemudian tahun berikutnya *disclimer* sebagaiaman yang tadi Paslon nomor 2 menyampaiakn bahwa soal-soal tehnis seperti ini sepertinya sangat menguasai. Barang kali kami bisa dijelaskan apa yang dilakukan oleh Pemprov ketika mengetahui adanya hal tersebut?

Khofifah
Menanggapai jawaban Gus Ipul:

Saya pikir mengetahui persis bagaiaman melakukan pendampingan *disclimer*, kami pernah dikementrian sosial dari *disclimer* dan langsung naik menjadi WTP. Kalau ada satu Kabupaten Kota kemudian *disclimer* karena koordinator atau ketua tim anggaran itu adalah Sekda, maka Sekdanya mestinya di PLT oleh Pemprov. Berikutnya adalah, mestinya kemudian segera dilakukan pansus dengan DPRD karena disitu kemudian kita akan melihat dinas-dinas mana yang tidak propor, dinas-dinas mana yang kelebihan bayar dan dinas dan seterusnya.

Ketika opini disclaimer keluar dari BPK berarti begitu banyak temuan sampai akhirnya tidak ada pendapat dari BPK dan

akhirnya *disclaimer* sehingga prosesi-prosesi seperti ini saya pikir tadi Paslon no 2 faham sekali bagaiaman sesungguhnya mengatasi berbagai hal-hal yang sudah WTP 7 kali di Pemprov, berarti kita melihat Pemprov yang mestinya bisa menjadi bagian untuk melakukan pendampingan dari proses yang harus dilakukan dimasing-maisng Kabupaten Kota yang mengalami *disclimer* rasanya Paslon no 2 harus banyak belajar kembali karena ternyata ketua tim anggaran, kemudian bagaiaman proses mengembalikan dan bagaimana kemudian PASUS harus di diapakan. *Disclimer* ini adalah anggaran Negara berarti dari rakyat mestinya diperuntukan oleh rakyat akuntabilitasnya semua harus terukur.

Emil

Menjawab pertanyaan dari Paslon 2:

Sinkronisasi tadi disampaikan tapi akhirnya yang dibicarakan adalah mengenai lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja ini adanya pertanyaan yang tidak sesuai dengan spirit sinkronisasi karena tidak sinkron. Namun demikian kalau kita bicara mengenai tadi balai kriya, perlu diketahui oleh Ibu Puti bahwa fokus tetap Jawa Timur tapi ada satu hal yang perlu diketahui satu-satunya wakil Jawa Timur yang ikut produk unggulan nasional ekspor kerajinan di tahun 2017 itu adalah dari Kabupaten yang kami pimpin.

Jadi jangan diikuti video-video yang kadang-kadang isinya tidak sesuai. Tapi mari kita kembali ke topik, ini Jawa Timur nah di Jawa Timur yaitu dia karena pertanyaan tidak sinkron kita juga bingung mau menjawabnya bagaimana. Tetapi kita ngomongin sinkronisasi nah ini kembali lagi tadi, bahwa Pak Saifulloh Yusuf menyampaikan kita ini sudah A ya, tapi mungkin belum tahu bahwa ada peringkat lagi diatas itu untuk SAKIP yaitu AA bahkan salah satu Kabupaten yang dibanggakan oleh beliau tadi sudah terbang ke salah satu daerah yang diproyeksikan akan mendapatkan AA, nah bagaiaman caranya untuk bisa bergerak dari A ke AA, persisnya atau balik BB ke A atau AA ke A. Ini saya kembalikan ke Paslon nomor nurut 2 bagaimana, karena ngomongin sinkronisasi tadi silahkan bisa dijawab pertanyaan yang saya berikan, terima kasih.

Emil
Menanggapi tanggapan Mbak Puti:

Ya itu dia kalo orang tidak paham definisi laboratorium kriya, dipikir itu laboratorium kayak biologi gitu loh jadi ada tempat untuk eksperimen atau apa. Bukan, laboratorium kriya itu kalau bahasa anak mudanya ngulik memeprtemukan penegrajin di Desa. Nah ini, ini ada kaitannya dengan program Jawa Timur ya. Bahwa kita ini ingin membina kearifan lokal, pengrajin Desa ada yang dia menguasai industri tanah liat, ada yang dia menguasai bambu, ada yang menguasai ukiran kayu. Tetapi ada juga yang sudah terpelajar ikut dididik baik di perguran tinggi negri, luar negeri dan memahami dan bahkan punya akses ke aplikasi software yang melihat tren furniture dan ekonomik kreative yang ada di dunia. Nah ini kita pertemukan, bahkan seorang pengrajin yang workshopnya itu di kandang kambing, disebeahnya kandang kambing itu produknya sekarang bisa diperkenalkan di ajang international. Nah ini dengan bantuan dari seorang disainer muda mereka ngulik bersama-sama, nah disinilah maka *leadership* menjadi penting.

Saya tidak akan menanggapi yang tadi karena pertanyaan yang sangat penting terkait kinerja terkait sinkronikasi juga tidak dijawab, tetapi yang paling penting sekarang masyarakt harus bisa menggunakan kesempatan ini untuk benar-benar memahami bahwa dalam memimpin suatu daerah *leadership* itu menjadi penting. Jadi, bukan hanya menghafalkan program-program atau misalnya Mbak Puti yang belum pernah duduk di Pemprov tapi mengulang program-program Pemprov nggak bisa, harus sudah dijalani terima kasih.

Segmen 6
Closing Statement
Khofifah
Asslamualaikum Wr. Wb
Saya Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak kami berdua mohon doa pangestu seluruh masyarakat ajwa timur yang saya cintai saya banggakan. Saudara-saudara saya yang ada di pulau-pulau yang ada di pegunungan yang ada di pesisir-pesisir di perkotaan. Kami berdua, menyampaikan terima kasih bahwa 126 hari

kami berproses bersapa berinteraksi kami mendaptkan rekomendasi-rekomendasi strategis pikiran-pikiran aspiratif bagaimana mereka berkeinginan bahwa Jawa Timur ini yang sudah berkemajuan berkeunggulan lebih maju lagi, lebih unggul lagi dan lebih cepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di semua lini. Mereka berharap tentu bahwa angka kematian ibu ank kematian bayi mereka bisa turunkan, pengangguran bisa di turunkan dijadikan lapangan pekerjaan yang cukup dengan kesejahteraan yang cukup. Mereka berharap bahwa akan ada penurunan kemiskinan yang sangat signifikan. Hal-hal seperti itu kami serap hal-hal seperti itu, kami catat hal-hal seperti itu, kami diskusikan tentu semuanya beru akan bisa kami wujudkan jika kami saya dan mas Emil mendapatkan kepercayaan untuk memimpin Jawa Timur pada 5 tahun yang akan datang. Kami mohon doa kami mohon pangestu mudah-mudahan kami mendaptakn mandate kepercayaan masyarakat untuk memimpin Jawa Timur yang akan datang.